

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERKAIT AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Hastina¹, Dini Ayu Safiltri², Ramadhan³, Andika⁴

¹ Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Congko

e-mail: hastinakhililah@gmail.com

² Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Dua Boccoe

e-mail: diniayusafiltri10120@gmail.com

³ Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Palakka

e-mail: khan.adam75yahoo.co.id

⁴ Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Bone, Mare

e-mail: ad6767905@gmail.com

ABSTRACT

Improving the quality of education is directly related to the role of schools as educational institutions. Management of teaching and learning in schools is very meaningful in determining student success. To achieve good quality schools, the cost of education must be managed optimally. Therefore, education funding must be considered to support the smooth learning in schools. Basically the purpose of educational funding is the implementation of the educational process that is in accordance with the expected learning needs of students. Accountability of education funding in schools is in the very high category, meaning that the school must be able to carry out education financing management to the fullest from the financial planning and budgeting, funding implementation, financing supervision and control or accountability.

Keywords: *Accountability, Financing, Education*

ABSTRAK

Peningkatan mutu pendidikan sangat berkaitan langsung dengan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan. Pengelolaan belajar mengajar di sekolah sangat berarti dalam menentukan keberhasilan siswa. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan harus diperhatikan untuk mendukung kelancaran pembelajaran di sekolah. Pada dasarnya tujuan pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Sekolah berada pada kategori sangat tinggi, artinya pihak sekolah harus mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal mulai dari perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan pertanggung jawaban (akuntabilitas).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pembiayaan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia mengemban misi pemerataan pendidikan dengan memberikan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia. Era global menunjukkan adanya paradigma baru pada berbagai aspek kehidupan, yang membawa konsekuensi bahwa setiap negara dituntut untuk berperan dalam kompetisi global.¹

Pendidikan merupakan pembangun atau penopang, maju atau tidaknya suatu bangsa dilihat dari pendidikan yang ada di negara tersebut. Namun proses globalisasi yang terjadi begitu cepat membuat dunia pendidikan nasional pun harus bersiap untuk bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia.

Manajemen pendidikan ditantang untuk menciptakan sekolah bermutu karena adanya perubahan paradigma baru dalam pendidikan di era global. Peningkatan kompetisi, pilihan dan tuntutan pelanggan pendidikan mempengaruhi pendidikan saat ini. Di sisi lain, pada saat yang sama faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan budaya sangat mempengaruhi pendidikan nasional, sehingga pendidikan memerlukan standarisasi untuk memenangkan kompetisi dan peningkatan kualitas/mutu terus-menerus. Lulusan bermutu merupakan sumber daya manusia yang diharapkan bersumber dari sekolah bermutu atau sekolah efektif. Ada banyak faktor yang diduga bermanfaat/berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan pendidikan, salah satunya adalah tentang masalah akuntabilitas.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.²

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah (Rida, 2015). Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pembiayaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Pembiayaan pendidikan merupakan upaya untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk

¹ Saril, "Total Quality Management (TQM) Sebagai Wujud Peningkatan Mutu Pendidikan," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 963–972.

² Jefril Rahmadoni, "Pekanbaru, Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Indonesian Creative School," *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 2 (Juli 25, 2018): 162.

meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu bekerjasama dilingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional.³

Permasalahan rendahnya daya saing pendidikan di Indonesia harus segera diatasi, terutama jika kita tidak mau terus menerus berada di bawah negara lain dalam hal kemampuan memanfaatkan proses globalisasi yang terjadi, dan juga mengingat bahwa negara-negara lain sampai saat ini pun belum berhenti untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikannya. Paradigma baru untuk pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing sekolah/institusi pendidikan di Indonesia.

Akuntabilitas harus dan perlu diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena mengingat biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan *output* yang berkualitas tidak luput dari ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi sangat tergantung dengan ketersediaan biaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai dengan fakta yang ada tentang akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih dengan dasar bahwa metode kualitatif bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian. Adapun teknik dalam pengumpulan data ialah dokumentasi dengan meneliti dokumen, jurnal maupun literature yang berkaitan dengan akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data maupun penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya mencapai output pendidikan yang berkualitas diperlukan upaya yang mendasar. Upaya mendasar tersebut menjadi tiang-tiang penyanggah ke arah bangunan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Artinya, upaya mendasar tersebut adalah pancangan tiang-tiang beserta fondasinya untuk menopang mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan pendidikan nasional akan sulit dicapai, apabila tidak memahami persoalan di tingkat unit terkecil satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dimulai dari membenahi pada tingkat satuan pendidikan.⁴

³ Ibid.

⁴ Riswandi, "Pelatihan Manajemen Sekolah Sebagai Upaya untuk Menciptakan Sekolah Efektif Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Tanggamus," *Jurnal Tarbiyah* 22, no. 1 (2015): 147–168.

Menurut Syafaruddin, dunia pendidikan harus memenuhi (1)Perbaikan manajemen sekolah; (2)Persediaan tenaga kependidikan yang professional; (3)Perubahan budaya sekolah (visi, misi, tujuan, dan nilai); (4)Peningkatan pembiayaan pendidikan, dan (5)Mengoptimalkan dukungan masyarakat terhadap pendidikan.⁵

Menyadari akan hal itu, maka salah satu upaya yang harus dan perlu difokuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah akuntabilitas pembiayaan pendidikan. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang baik akan memperoleh dan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas maka hal itu sudah menopang keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

1. Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap institusi pendidikan. Akuntabilitas dapat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dan memberikan kewenangan. Institusi Pendidikan harus akuntabel terhadap stakeholders.

Istilah akuntabilitas sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu kala. Namun skala penggunaannya di kala itu masih tidak sesering sekarang. Hanya ada beberapa pemimpin yang mungkin dianggap “bijaksana” yang mempergunakan akuntabilitas. Di masa sekarang dimana ada perubahan bentuk-bentuk negara menjadi republik, demokrat, ataupun tetap menggunakan sistem kerajaan yang sudah dimodifikasi (dimana kekuasaan seorang raja tidak lagi seluas dahulu – lebih sering hanya sebagai simbol dan urusan persahabatan) maka permintaan dan penggunaan akuntabilitas menjadi semakin meningkat. Hal ini karena pemimpin (presiden, perdana menteri, dll) dipilih dan mengemban tugas dari rakyat. Hal ini meluas sampai ke tingkat berbagai organisasi/institusi pemerintah dan swasta bahkan sampai ke tingkat individu yang terkecil.

Pengertian Akuntabilitas secara singkat adalah tanggung jawab kepada seseorang atau untuk suatu kegiatan. Secara harfiah, konsep akuntabilitas atau “*accountability*” berasal dari dua kata, yaitu “*account*” (rekening, catatan, laporan) dan “*ability*” “kemampuan”. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.⁶

⁵ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Grasindo, 2002, hal.16

⁶ Erna Fitriatun, “Akuntabilitas Publik,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

b. Kegunaan dan fungsi akuntabilitas

Ada lima Fungsi akuntabilitas:

1. Akuntabilitas berfungsi untuk memberikan jaminan melalui evaluasi eksternal, bahwa institusi atau program dapat dinilai akuntabel bagi para stakeholder seperti pemerintah (atas nama pembayar pajak), kaum profesi, para pekerja, dan siswa.
2. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai prinsip dan praktek yang ada dalam pendidikan tinggi tidak tererosi atau habis oleh waktu atau mungkin ketinggalan jaman.
3. Akuntabilitas kepada pihak siswa bahwa program yang ada telah diorganisir dan dijalankan seperti yang diminta.
4. Fungsi akuntabilitas dari evaluasi kualitas berbagai prosedur adalah mengenai cakupan informasi publik yaitu tentang kualitas dari berbagai institusi dan program.
5. Akuntabilitas berfungsi untuk mempergunakan evaluasi akan kualitas sebagai kendaraan untuk menerima suatu bentuk pemenuhan/ketaatan.⁷

Evaluasi akan mendorong munculnya pemenuhan/ketaatan pada kebijakan pemerintah atau pada kebijakan tertentu dari pihak stakeholders seperti persatuan kaum profesional dan persatuan para pemberi kerja. Pihak pemerintah biasanya adalah yang paling kuat dalam hal ini dan paling memiliki kepentingan akan hal ini pada pendidikan tinggi karena pemerintah menjadi penyedia begitu banyak uang dan pada banyak kasus mereka berkuasa mengontrol proses lisensi dari berbagai institusi.

c. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam UUD 1945 Pasal 31 “Tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataannya, tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kondisi inilah kemudian mendorong dimasukkannya klausul tentang pendidikan dalam amandemen UUD 1945.

Secara garis besar, standar pembiayaan sekolah mencakup beberapa di dalam pengelolaan lembaga Pendidikan. Hal-hal tersebut terdiri dari pembiayaan Pendidikan, biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi satuan Pendidikan. Pembiayaan Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan Pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga

⁷Afid Burhanuddin, “Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan,” diakses Juni 22, 2020, <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/17/akuntabilitas-pembiayaan-pendidikan-2/>.

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi Pendidikan tak langsung.⁸

Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dapat berjalan lancar jika pengelolaan tersebut dibagi menjadi tiga bagian yakni otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengajuan dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah petugas yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya.⁹

Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (*revenue theory of cost*). Dalam menghitung biaya pendidikan ini, factor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada didalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, dapat dihitung menggunakan teknik (*cost analysis*): (1) *productivity measurement* atau analisa *cost-effectiveness* atau (2) analisa *cost-benefit*. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk individu tersebut (*private rate of return*) ataupun untuk masyarakat secara luas (*social rate of return*).

Isu lain berkaitan dengan biaya pendidikan ini adalah: perbedaan pengeluaran anggaran dibidang pendidikan di negara maju dengan negara berkembang, perbedaan biaya sekolah baik di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Selain itu juga perbedaan biaya untuk pendidikan termasuk investasi pendidikan terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sistem biaya pendidikan merupakan proses dimanapendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem biaya pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya system dengan kondidsi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: (1) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; (2) distribusi alokasi sumber daya pendidikan

⁸ E Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 42

⁹ Fajri Dwiyama, "Unsur Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 675–695.

secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sector pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.¹⁰

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan.

Lebih lanjut, analisis biaya dalam pendidikan mencakup keefektifan biaya (cost affectiveness), keuntungan biaya (cost benefit), kemanfaatan biaya (cost-utility), dan kesisibilitas biaya (cost- feasibility). Selanjutnya, secara rinci masing- masing analisis biaya diuraikan sebagai berikut: 1) Analisis keefektifan biaya. Suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan digunakan secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata sesudah selesai pekerjaan mendidik itu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai; 2) Analisis keuntungan biaya. Analisis ini menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan; 3) Analisis kemanfaatan biaya adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaatnya atau nilai outcomenya; dan 4) Analisis kesisibilitas biaya.¹¹ Analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti analisis sebelumnya, analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak, bila dihubungkan dengan dana yang tersedia. Bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumber pendidikan lainnya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan, atau alternatif tersebut tidak fisibel.

d. Jenis biaya pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Sulistyoningrum, 2010). Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Lebih lanjut, biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi: a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan

¹⁰ Nanang Fatah, "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris," *Jurnal Pendidikan Dasar*, no. 9 (2008).

¹¹ W.P Ferdi, "Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoritis," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 19, no. 4 (2013): 565–578.

prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Sulistyoningrum, 2010).¹²

Dalam perkembangannya, kebutuhan pendanaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan pendanaan pendidikan erat kaitannya dengan keperluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan); 2) proses pembelajaran dan penilaian; 3) pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan sarana-prasarana pendidikan; dan 4) manajemen. Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).¹³ Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

e. Tujuan akuntabilitas pembiayaan pendidikan

Tujuan akuntabilitas pembiayaan pendidikan agar terciptanya kepercayaan masyarakat luas terhadap suatu sekolah atau instansi terkait. Kepercayaan publik yang besar terhadap sekolah/instansi dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dari mereka terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sehingga sekolah mudah dalam mengelola pendidikan dan menciptakan peluang yang besar atas partisipasi dari publik.

Selain itu, tujuan dari akuntabilitas pembiayaan adalah untuk menilai bagaimana pencapaian kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan pelayanan pendidikan serta mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada masyarakat luas.

Penjelasan diatas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen pada sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong yang kemudian mempengaruhi munculnya kepercayaan dan partisipasi publik yang lebih tinggi lagi. Bahkan, bisa dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal untuk mempertahankan eksistensi sekolah ditengah masyarakat.

2. Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Indoneisa

Biaya pendidikan di Indonesia merupakan salah satau masalah yang dirasakan masih krusial, Meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber belajar. Berapa banyak sekolah yang tidak dapat melakukan

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

kegiatan belajar-mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.

Oleh karena itu, sekolah seharusnya mampu mengelola keuangan yang ada sehingga dapat menghindari penggunaan biaya yang tidak perlu/ tidak direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Efektivitas pembiayaan merupakan salah satu alat ukur efisiensi, sehingga program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan lebih amat penting lagi menghindari dan menseleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan, dan biaya lain yang mengarah pada pemborosan.¹⁴

Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) merupakan suatu rancangan pembiayaan pendidikan di sekolah dalam rangka mengatur dan mengalokasikan dana pendidikan yang sumbernya sudah terkalkulasi jumlah dan besarnya, baik merupakan dana rutin bantuan dari Pemerintah berupa dana bantuan operasional atau dana lain yang berasal dari sumbangan masyarakat atau orang tua peserta didik.¹⁵

Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi menghendaki pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sekolah seharusnya mampu mengelola keuangan yang ada sehingga dapat menghindari penggunaan biaya yang tidak perlu/ tidak direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Efektivitas pembiayaan merupakan salah satu alat ukur efisiensi, sehingga program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu, dan lebih amat penting lagi menghindari dan menseleksi penggunaan dana operasional, pemeliharaan, dan biaya lain yang mengarah pada pemborosan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori hasil dan pembahasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan dibuat agar terciptanya kepercayaan masyarakat luas terhadap suatu sekolah atau instansi terkait. Kepercayaan publik yang besar terhadap sekolah/instansi dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi dari mereka terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sehingga sekolah mudah dalam mengelola pendidikan dan menciptakan peluang yang besar atas partisipasi dari publik. Akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen pada sekolah, tetapi merupakan faktor pendorong yang kemudian mempengaruhi munculnya kepercayaan dan partisipasi publik yang lebih tinggi lagi.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Fatah, "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris."

Bahkan, bisa dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal untuk mempertahankan eksistensi sekolah ditengah masyarakat.

2. Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, Meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber belajar. Berapa banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. Efisiensi pendanaan pendidikan ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu prestasi belajar peserta didik.

Mengacu pada kesimpulan di atas terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan/sekolah, maka penyelesaian masalah pembiayaan pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah, namun harus ditempuh berbagai langkah atau dengan tindakan yang strategis. Artinya, tidak hanya memperhatikan pada upaya untuk menaikkan anggaran pendidikan saja.
2. Akuntabilitas harus dan perlu diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan apalagi dalam hal ini adalah pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin, Afid. "Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan." Diakses Juni 22, 2020.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/01/17/akuntabilitas-pembiayaan-pendidikan-2/>.

Dwiyama, Fajri. "Unsur Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia."

Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 7, no. 1 (2018): 675–695.

Fatah, Nanang. "Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris." *Jurnal Pendidikan*

Dasar, no. 9 (2008).

Ferdi, W.P. "Pembiayaan Pendidikan; Suatu Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*

19, no. 4 (2013): 565–578.

Fitriatun, Erna. "Akuntabilitas Publik." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9

(2019): 1689–1699.

Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rahmadoni, Jefril. "Pekanbaru, Isu Global Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Indonesian

Creative School." *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan* 3, no. 2 (Juli 25, 2018): 162.

- Riswandi. "Pelatihan Manajemen Sekolah Sebagai Upaya untuk Menciptakan Sekolah Efektif Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Tanggamus." *Jurnal Tarbiyah* 22, no. 1 (2015): 147–168.
- Saril. "Total Quality Management (TQM) Sebagai Wujud Peningkatan Mutu Pendidikan." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 963–972.
- Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Grasindo, 2002.